



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOH ROYANI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 661480

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2500 m²/450 m² di SIAK, HASIL SENDIRI Rp. 1.165.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/108 m² di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA V Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 160.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.755.000.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.755.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULFADLI NUGRAHA TRIYAN PUTRA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 693421

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	257.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1997 m2/240 m2 di KUANTAN SINGINGI, WARISAN Rp. 131.000.000		
2. Tanah Seluas 600 m2 di SIAK, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.621.457
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	266.621.457
III. HUTANG	Rp.	271.033.331
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-4.411.874

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD DARDIRI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 670004

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 730.000.000

1. Tanah Seluas 10000 m2 di ---, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di ---, LAINNYA Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/221 m2 di BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 332.500.000

1. MOTOR, VARIO HONDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, NMAX METIK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOBIL, MITSUBISIH DUM TRUK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 8.389.027

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.070.889.027

III. HUTANG

Rp. 276.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 794.889.027

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRIYANTO**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **622538**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **175.000.000**

1. Tanah Seluas 1.077 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 292 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 4.862 m2/50 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **120.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CALYA TYPE G MANUAL 1,2 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **9.225.951**

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. **304.225.951**

III. HUTANG Rp. **35.409.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **268.816.951**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SALMON DALIYOTO**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **622540**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 680.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/37 m2 di KAB / KOTA SIAK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10.000 m2/10.000 m2 di KAB / KOTA KUANTAN SINGINGI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 283.250.000

1. MOTOR, HONDA C86 CUP 70 Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA CUP 70 Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 5.750.000
3. MOBIL, SUZUKI XL7 ALPHA MT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 164.295.560**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.085.152**F. HARTA LAINNYA** Rp. 13.900.000

Sub Total Rp. 1.149.530.712

III. HUTANG Rp. 583.072.321**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 566.458.391

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIZKI KURNIAWAN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 622549

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	67.500.000
1. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOBIL, FORD FIESTA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.125.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.469.290
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	102.094.290
III. HUTANG	Rp.	294.383.135
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-192.288.845

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.